

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang Disurvei oleh KPK di Tahun 2013)**

***THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON THE LEVEL OF CORRUPTION
(Study on Local Government in Indonesia Surveyed by KPK in 2013)***

Cyndi Putri Permata Sari Sitorus¹, Sri Rahayu²

^{1,2,3} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹putricyndi@gmail.com, ²srirahayu@telkomuniversity.co.id

ABSTRAK

Transparansi dan opini audit pada laporan keuangan yang menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Terkait dengan hal itu, terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil transparansi dan akuntabilitas yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi. Sehingga, perlu dilakukan penelitian untuk melihat keterkaitan transparansi dan akuntabilitas dengan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas serta tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi berganda. Data transparansi diperoleh dari *website* masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Data akuntabilitas diperoleh dari opini yang diterbitkan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BPK RI) melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* karena sampel tidak dipilih secara acak. Sampel pada penelitian ini antara lain 60 instansi pemerintah daerah yang masuk dalam hasil Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2013. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS).

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa rata-rata transparansi sudah maksimum dan akuntabilitas dalam opini audit yang diperoleh pemerintah daerah adalah opini audit wajar dengan pengecualian. Sedangkan, tingkat korupsi pada pemerintah daerah masih rendah. Hasil pengolahan data evaluasi pengaruh, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sebaiknya memperhatikan pengukuran lain seperti kinerja keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan indikator dari akuntabilitas lainnya.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Tingkat Korupsi

ABSTRACT

Transparency and audit opinion on financial statements that indicate the accountability of a local government is expected to reduce the occurrence of acts of corruption. Related to that, there are local governments that get the results of transparency and accountability are good but still caught in the criminal act of corruption. Thus, it is necessary to conduct research to see the relevance of transparency and accountability with the level of corruption in local government in Indonesia.

This study aims to determine the transparency and accountability and level of corruption in local government in Indonesia and analyze the effect of transparency and accountability to the level of corruption in local governments in Indonesia in 2013.

This research uses secondary data with multiple regression analysis technique. Transparency data is obtained from the website of each local government in Indonesia. Accountability data is obtained from the opinion issued by the Indonesian House of Representatives (BPK RI) through Summary of Semester Examination Results (IHPS). This study used nonprobability sampling because the sample was not randomly selected. The sample in this research are 60 local government institutions that are included in Public Sector Integrity Survey conducted by Corruption Eradication Commission (KPK) in 2013. Data processing is done by using Statistical Product and Service Solutions (SPSS).

Based on the results of data processing, it can be seen that the average of transparency has been maximum and accountability in the audit opinion obtained by the local government is qualified opinion..

Meanwhile, the level of corruption in local government is still low. The results of data processing influence evaluation, indicating that transparency and accountability have no effect simultaneously or partially to the level of corruption in local government in Indonesia in 2013.

Based on the results of the research, to reduce the occurrence of corruption should consider other measures such as financial performance, internal control system and regulatory compliance indicating indicators of other accountability.

Keywords : Transparency, Accountability, Level of Corruption

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Hal ini menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Korupsi terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Transparency International (TI)*, pada tahun 2013, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati posisi urutan 114 dari 175 negara yang diukur dengan skor sebesar 32. Skor tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan atau konstan dari tahun sebelumnya. Skor tersebut didapat dari persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi di Indonesia. Semakin tinggi skor maka semakin bersih pula negara tersebut dari korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkapkan bahwa 156 pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2013 mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian atau dapat dikatakan jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Namun, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2013 di Indonesia terjadi 560 kasus korupsi dan sebanyak 1.271 orang tersangka yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7,3 triliun rupiah. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 159 kasus dibandingkan selama tahun 2012, yaitu sebesar 401 kasus korupsi dan skor indeks persepsi korupsi Indonesia konstan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui transparansi pada situs resmi pemerintah, akuntabilitas yang diukur dengan opini audit yang diterima dan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, serta mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

2. Dasar Teori dan Metodologi Transparansi

Transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal (Sedarmayanti dalam Yayuk, 2015). Ukuran transparansi yang digunakan dalam penelitian ini melihat seberapa banyak informasi pemerintah daerah yang terdapat dalam website pemerintah daerah.

Sehingga ada enam indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi tersebut yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat, terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, serta informasi lainnya yang terkait transparansi.

Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini menggunakan pengukuran transparansi dengan skala 1 sampai 4. Apabila memenuhi enam indikator tersebut dan selisih satu indikator maka pemerintah daerah tersebut akan diberi skor 4, dan seterusnya. Semakin banyak informasi yang dirilis Pemerintah Daerah ke dalam website, maka diasumsikan semakin tinggi pula tingkat transparansi Pemerintah Daerah tersebut (Khairudin dan Rina Erlanda, 2016:147).

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Setiawan (2013:19), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah. Sehingga untuk mengetahui akuntabilitas LKPD maka perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan sejalan dengan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK atas LKPD, tingkat akuntabilitas disajikan salah satunya dalam opini audit

(BPK,2009).

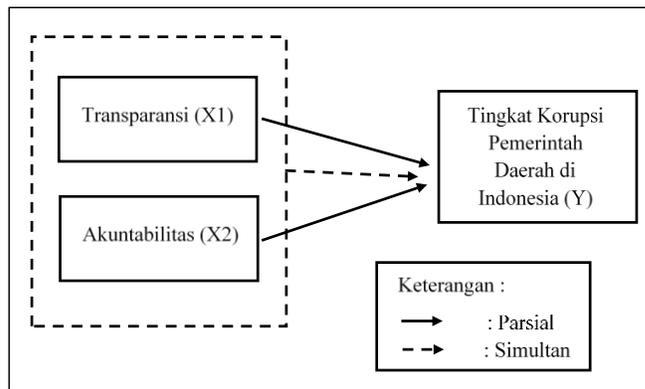
Opini audit BPK RI terdiri dari yaitu, wajar tanpa pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP), wajar dengan pengecualian (WDP/*qualified opinion*), tidak wajar (TW/*adverse opinion*) dan tidak memberikan pendapat (TMP/*disclaimer opinion*). Sehingga pengukuran opini audit menggunakan skala 1 sampai 5.

Tingkat Korupsi

Korupsi umumnya didefinisikan sebagai keuntungan pribadi (Tuanakotta, 2010: 226, 230). Kebanyakan korupsi yang terjadi saat ini karena sifat dari korupsi itu sendiri yang merupakan suatu tindakan yang tersembunyi yang memang disengaja oleh pelakunya (Heriningsih, 2015).

Menurut Santoso et. al (2014:27), secara umum, beberapa faktor penyebab maraknya korupsi antara lain adalah penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum serta keberadaan mafia hukum), administrasi birokrasi yang membuka peluang korupsi (perijinan, kewenangan yang luas, mata rantai birokrasi,dan lain lain), gaji rendah, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.

Menurut Alfitra (2014:37), sebagaimana arti harfiahnya yang berarti kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari yang suci dan yang luhur, korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan bangsa. Dampak korupsi yang paling utama adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel 60 instansi pemerintah daerah yang masuk dalam survei integritas sektor publik KPK tahun 2013. Data diperoleh dari website resmi BPK RI dan website KPK. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik analisis regresi linier berganda.

3. Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa jumlah sampel (n) sebanyak 60 daerah kabupaten dan kota. Variabel transparansi memiliki nilai minimum 2.00 dan nilai maksimum 4.00 karena pengukuran menggunakan skala interval 1 sampai 4. Variabel transparansi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.2333 yang berarti bahwa transparansi pemerintah daerah di Indonesia rata-rata sebesar 3.23% selama tahun 2013 dan nilai varians dari variabel transparansi sebesar 0.419. Standar deviasi transparansi adalah sebesar 0.64746 yang artinya bahwa sebagian besar data memiliki jarak sebesar 0.64746 dari nilai rata-rata (*mean*). Nilai standar deviasi variabel transparansi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok.

Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai maksimum 5.00 karena menggunakan pengukuran skala interval 1 sampai 5. Nilai rata-rata (*mean*) variabel akuntabilitas yaitu sebesar 3.6000 yang berarti bahwa akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia rata-rata sebesar 3.6% selama tahun 2013 dan nilai varians dari variabel akuntabilitas sebesar 0.922. Variabel akuntabilitas memiliki standar deviasi sebesar 0.96023 yang menandakan bahwa sebagian besar data memiliki jarak sebesar 0.96023 dari nilai rata-rata (*mean*). Nilai

standar deviasi variabel akuntabilitas lebih kecil daripada nilai rata-rata menandakan bahwa data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok.

Variabel tingkat korupsi memiliki nilai minimum sebesar 2.29 dan nilai maksimum sebesar 4.32. Nilai rata-rata (*mean*) variabel tingkat korupsi yaitu sebesar 3.2033 yang berarti bahwa tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia sebesar 3.2% selama tahun 2013 dan nilai varians dari variabel tingkat korupsi sebesar 0.198. Standar deviasi variabel tingkat korupsi yaitu sebesar 0.44484 yang berarti bahwa sebagian besar data yang terdistribusi memiliki jarak 0.44484 dari nilai rata-rata (*mean*). Nilai standar deviasi variabel tingkat korupsi lebih kecil daripada nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, pengujian regresi berganda menggunakan uji asumsi klasik. Dalam hal ini uji asumsi klasik meliputi : uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi di mana variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Prayitno, 2012:144). Berdasarkan penelitian, hasil uji normalitas terhadap variabel residual menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 1.000, di atas tingkat sinifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0.05. Kesimpulan dari uji *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Prayitno (2012:151), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Berdasarkan penelitian, hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki *tolerance value* lebih dari 0.10 atau 10%. Nilai *tolerance* transparansi $1.000 > 0.10$, dan nilai *tolerance* akuntabilitas $1.000 > 0.10$. Selain itu, hasil perhitungan dari VIF juga menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diuji memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian tersebut tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Prayitno, 2012:158). Berdasarkan penelitian, hasil pengujian uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, RES2. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi kedua variabel independen yaitu transparansi, dan akuntabilitas menunjukkan angka lebih besar dari ($>$) 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Prayitno, 2012:172). Penelitian ini tidak melakukan pengujian autokorelasi karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross section*.

Uji Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. Penelitian ini untuk melihat seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.035 atau apabila diukur dengan persentase yaitu sebesar 3.5%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi sebesar 3.5% oleh transparansi dan akuntabilitas serta 96.5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari kedua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model tersebut.

Pengujian Hipotesis dan Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi F dan nilai $\alpha = 0.05$. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian simultan pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1
Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	2	.001	.006	.994 ^b
	Residual	11.673	57	.205		
	Total	11.675	59			
a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi						
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi						

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel di atas, menunjukkan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.994. Jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0.05, nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar (0.994 > 0.05) sehingga dapat dijelaskan bahwa secara bersamaan (simultan), variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil pengujian secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu opini audit dan temuan audit secara individu (parsial) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi t dan nilai $\alpha = 0.05$. Jika nilai signifikansi t lebih besar dari nilai α maka terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.228	.370		8.732	.000
	Transparansi	-.010	.091	-.014	-.106	.916
	Akuntabilitas	.002	.061	.004	.029	.977
a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi						

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, maka rumus regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Korupsi} = 3.228 - 0.010 \text{ Transparansi} + 0.002 \text{ Akuntabilitas} + e$$

Rumus regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 3.228 menunjukan bahwa apabila transparansi, dan akuntabilitas memiliki nilai sebesar nol, maka nilai tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia sebesar 3.228%.
2. Koefisien regresi variabel transparansi dengan nilai 0.010 bertanda negatif artinya transparansi memiliki pengaruh ke arah negatif terhadap tingkat korupsi atau mengindikasikan bahwa apabila transparansi mengalami peningkatan sebesar 1% dan faktor lainnya konstan maka akan menyebabkan penurunan tingkat korupsi.
3. Koefisien regresi variabel akuntabilitas dengan nilai 0.002 bertanda positif artinya akuntabilitas memiliki pengaruh ke arah positif terhadap tingkat korupsi atau mengindikasikan bahwa apabila akuntabilitas mengalami peningkatan sebesar 1% dan faktor lainnya konstan maka akan menyebabkan peningkatan tingkat korupsi.

Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat korupsi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah transparansi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, menyatakan bahwa secara parsial variabel transparansi

memiliki nilai koefisien regresi -0.010 dengan arah negative dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.916. Nilai signifikansi tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0.05 atau $0.916 > 0.05$, sehingga secara parsial variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak semua transparansi yang maksimum akan menunjukkan tingkat korupsi yang rendah dan tidak semua transparansi yang minimum akan menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairudin dan Rina Erlanda (2016) yang secara statistik menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi karena transparansi yang diukur pada situs resmi pemerintah daerah belum menjamin didalam suatu entitas terbebas dari adanya kasus korupsi.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat korupsi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, menyatakan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi 0.002 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0.977. Nilai signifikansi tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0.05 atau $0.977 > 0.05$, sehingga secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa baik opini auditor WTP atau pun *disclaimer* sekalipun masih banyak terindikasi adanya korupsi di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suchyo dan Heriningsih (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas yang diukur dengan opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi karena opini terbagus (WTP) belum tentu menjamin adanya bebas korupsi.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian analisis deskriptif, transparansi pada pemerintah daerah di Indonesia memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 3.2333, artinya rata-rata transparansi pada pemerintah daerah di Indonesia adalah sebesar 3.2333% dari total sampel selama tahun 2013. Nilai maksimum transparansi adalah sebesar 4.00 dan nilai minimum sebesar 2.00. Standar deviasi transparansi sebesar 0.64746 dan lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, menunjukkan bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai maksimum 5.00 karena menggunakan pengukuran skala interval 1 sampai 5. Nilai rata-rata (*mean*) variabel akuntabilitas yaitu sebesar 3.6000 yang berarti bahwa akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia rata-rata sebesar 3.6% selama tahun 2013 dan nilai varians dari variabel akuntabilitas sebesar 0.922. Variabel akuntabilitas memiliki standar deviasi sebesar 0.96023 yang menandakan bahwa sebagian besar data memiliki jarak sebesar 0.96023 dari nilai rata-rata (*mean*). Nilai standar deviasi variabel akuntabilitas lebih kecil daripada nilai rata-rata menandakan bahwa data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok.

Variabel tingkat korupsi memiliki nilai minimum sebesar 2.29 dan nilai maksimum sebesar 4.32. Nilai rata-rata (*mean*) variabel tingkat korupsi yaitu sebesar 3.2033 yang berarti bahwa tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia sebesar 3.2% selama tahun 2013 dan nilai varians dari variabel tingkat korupsi sebesar 0.198. Standar deviasi variabel tingkat korupsi yaitu sebesar 0.44484 yang berarti bahwa sebagian besar data yang terdistribusi memiliki jarak 0.44484 dari nilai rata-rata (*mean*). Nilai standar deviasi variabel tingkat korupsi lebih kecil daripada nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh transparansi secara parsial dan tidak terdapat pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian kembali dengan menambahkan periode nya atau pun dengan periode yang berbeda dan dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat korupsi, seperti kinerja keuangan, kinerja penyelenggara sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Bagi pemerintah daerah diharapkan perlu waspada lagi terhadap tindakan korupsi karena transparansi pada situs resmi dan hasil akuntabilitas dalam hal opini audit yang baik sekalipun tidak menjamin tindakan korupsi berkurang di suatu pemerintah daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP korupsi, money laundering, dan trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [2] Heriningsih, Suchafo. 2015. *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis dari Opini Auditor*. ISSN 2407-9189.
- [3] Heriningsih, Suchafo. 2014. *Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Paradigma Volume 18, Nomor 2.
- [4] Khairudin dan Erlanda, Rina. 2016. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, hal 137-154.
- [5] Masrurroh, Yayuk Rifqi. 2015. *Pelaksanaan Good Governance di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir*.
- [6] Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- [7] Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A. C., Muhajir, M., dan Mardiah, S. (2014). *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor, CIFOR.
- [8] Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [9] Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] www.bpk.go.id
- [11] www.ti.or.id